

POLITIK ISLAM DAN PENCEGAHAN RADIKALISME DI INDONESIA ¹

Dr. Ikhwan, S.H.,M.Ag.²

A. Pengertian Radikalisme

Radikalisme berasal dari kata radikal (bahasa latin radix) yang berarti akar. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar dan mengakar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap status quo dengan jalan menghancurkan status quo secara total dan menggantinya dengan sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda. Radikalisme dapat dimaknai sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis dengan cara kekerasan. Radikalisme memiliki penilaian yang berbeda terhadap situasi politik di mana penganutnya membenarkan dan bahkan membutuhkan tindakan kekerasan (political violence) sebagai satu-satunya jalan untuk melakukan perubahan politik.

B. Indikator Radikalisme

Radikalisme dapat dikenal dari ciri-cirinya. Secara umum, ada beberapa ciri yang menandakan suatu gerakan terkategori sebagai gerakan radikal. Pertama, intolerans, yakni tidak menyukai perbedaan, mengotak-kotakkan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Kedua, fanatisme, percaya terhadap paham/pendapat secara berlebihan. Cenderung melihat dunia secara hitam putih. Ketiga, eksklusif, yaitu cenderung memisahkan diri dan tidak akan mau bergabung dengan kelompok lain. Keempat, revolusioner, yakni melakukan perubahan dengan cepat dan cenderung destruktif. Ciri-ciri umu tersebut terdapat pada semua gerakan radikal.³ Sementara, untuk gerakan radikalisme politik Islam, Noorhaidi Hassan mengemukakan dua ciri utama. *Pertama*, visi tentang tatanan politik Islam yang

¹ Dipresentasikan pada Seminar Internasional "Sharia and Dynamics of Political Islam in Southeast Asia" Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol, Basko Hotel, Padang 30 Nopember 2019

² Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

³ Sulistyو Pudjo Hartono

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ybDRGJPK-empat-indikator-warga-terpapar-radikalisme> diakses 15-11-2019

menolak legitimasi negara bangsa modern dan berupaya mendirikan pemerintahan *Pan-Islam* ataupun *merevitalisasi sistem kekhalifahan*. Lahirnya pan-Islam bermula dari para pembaharu Islam yang melihat terpuruknya keadaan dunia Islam akibat dari pengaruh Barat dan tersebarnya tarekat yang menyimpang. *Kedua*, penekanan terhadap perjuangan kekerasan (jihad) sebagai metode utama dan bahkan satu-satunya yang dianggap sah untuk mewujudkan perubahan politik.⁴

C. Gerakan Radikal Indonesia

Radikalisme agama pasca kemerdekaan terjadi pada dekade 1950, hal mana ini ditandai dengan munculnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Namun pada tahun 1962 gerakan DI/TII dapat dipatahkan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi gerakan ini telah terlanjur mendapat simpati dan dukungan dari sebagian kalangan umat Islam di Indonesia.

Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an gerakan Islam garis keras muncul kembali, seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talangsari oleh Warsidi dan Teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam, dan sebagainya. Pasca Orde Baru, gerakan Islam beraliran radikal banyak muncul dengan berbagai model dan tipologi yang secara umum mencerminkan pemahaman **legal-formal** (kecenderungan menampilkan Islam tekstual sebagaimana dituntunkan syariat Islam); **doktriner** (kecenderungan memahami dan mempraktikkan Islam serba mutlak dan kaku); **militant** (sikap keagamaan yang semangat tinggi hingga berhaluan keras).⁵ Kelompok Islam yang mengembangkan corak legal-formal, doktriner dan militant, misalnya **Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir**, Komite Persiapan Penegakan syariat Islam (**KPPSI**) Sulawesi Selatan, **FPI**, dan partai-partai Islam (PKS, PBB, PPP).⁶

D. Faktor Penyebab Radikalisme

Secara ekonomi-politik, akar dari Islam Radikal adalah adanya pertentangan kelas antara kelas borjuasi yang berwajah “moderat” dan “pro-pemerintah” melawan mereka yang termarginalisasi. Fenomena ini secara nasional dapat dibaca melalui adanya akumulasi kapital di kalangan kelompok pemodal, dan dalam level internasional dapat dibaca melalui skema dependensia antara Indonesia dengan negara-negara yang menjadi hegemoni melalui praktik-praktik ekonomi. Sementara

⁴ Noorhaidi Hassan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta: SUKA PRESS UIN Sunan Kalijaga, 2012), 23.

⁵ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariah: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Yogyakarta: Review Disertasi Doktor Sosiologi UGM, 2005), h. 69-70.

⁶ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 114.

itu, pada basis struktural dapat dilihat bahwa adanya oligarki elit yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi ternyata berdampak pada munculnya kelompok-kelompok yang termarginalkan dan termiskinkan secara struktural. Hal ini kemudian berdampak pada kesadaran kelas mereka dengan menggunakan "syariat Islam" sebagai basis ajaran sentral yang dapat menggantikan peran negara yang gagal mengantisipasi kesenjangan struktural tersebut.

Pada awalnya, alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan-gerakan Islam garis keras tersebut adalah dilatarbelakangi oleh politik lokal: ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik dll. Namun setelah terbentuk gerakan, agama meskipun pada awalnya bukan sebagai pemicu, kemudian menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting bagi gerakan Islam garis keras. Sungguhpun begitu, radikalisme agama yang dilakukan oleh sekelompok muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai biang radikalisme. Yang pasti, radikalisme berpotensi menjadi bahaya besar bagi masa depan peradaban manusia.

E. Kompleksitas Persoalan

Kekerasan aktivisme Islam memiliki kompleksitas persoalan. Penjelasan ideologi dan psikologis tidak cukup untuk memahami mengapa aksi-aksi kekerasan bahkan terorisme itu muncul. Kekerasan aktivisme Islam hakikatnya adalah gejala sosial politik, bukan konsep agama. Aksi-aksi kekerasan oleh aktivisme Islam mengandung motif dan tujuan politik, klaim politik dan perjuangan politik.⁷ Sebagai konsep politik, kekerasan oleh aktivisme Islam merupakan aksi dari sekelompok individu rasional yang memiliki keterbatasan akses untuk melakukan perubahan. Karena itu, kekerasan aktivisme Islam hingga dalam bentuk terorisme merupakan gerakan politik penentangan (*contentious politics*), bukan sebuah gerakan keagamaan yang diklaim sebagai jihad.

Klaim jihad dalam gerakan terorisme lebih dari strategi kerangka aksi (*framing*) daripada sumber doktrinal dari tindakan kekerasan. *Framing* merupakan strategi untuk memproduksi wacana, memobilisasi dukungan, dan skema pengandaian musuh. Pada kenyataannya strategi ini jarang dipahami sehingga terjebak dalam logika global dimana kekerasan berbasis Islam bersumber dari pemahaman sempit atas tektualitas agama.

Kekerasan sebagai bentuk perlawanan merupakan pilihan rasional, tergantung kendala dan hambatan dalam batas toleransi politik yang memberikan keputusan mengambil manfaat dan legitimasi pembenaran aksi-aksi kekerasan. Karena itu,

⁷ Ali Asghar, "Islam Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam Indonesia," dalam *Jurnal Keamanan Nasional* Vol.I No.2 2015

kekerasan aktivisme Islam dilakukan dengan kesadaran sebagai pilihan rasional untuk meraih tujuan bukan sebagai aktualisasi rasa frustrasi, kegalauan, dan sejenisnya. **Robert A. Pape** menyebut faktor di balik aksi-aksi kekerasan oleh aktivisme Islam dalam bentuk bom bunuh diri bukanlah didorong oleh semata-mata faktor fundamentalisme agama, sebaliknya justru lebih didorong oleh motif sekuler yaitu, nasionalisme dalam bentuk politik penentangan mengusir pendudukan Amerika di negara-negara Islam. Tesis Pape penting untuk menjelaskan apakah kekerasan aktivisme Islam bertalian erat dengan ideologi agama, namun jawabannya adalah tidak. Kekerasan aktivisme Islam pada umumnya adalah gerakan politik penentangan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.⁸

Faisal Devji mempertanyakan representasi Islam sebagai motif dari aksi radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan terorisme menurut Devji bukan bersumber dari faktor keagamaan tetapi lebih dari suatu bentuk protes terhadap paradoks tatanan dunia global yang tidak adil. Paradoks-paradoks tersebut dengan sendirinya memunculkan aksi-aksi kekerasan atau radikalisme yang lebih identik sebagai gerakan moral dalam upaya mewujudkan perubahan.⁹

Kekerasan aktivisme Islam merupakan pertautan antara agama, politik dan ekonomi yang muncul sebagai bentuk protes terhadap tatanan kehidupan yang tidak seimbang. Pada titik ini, gerakan aktivisme Islam membangun fondasi framing dengan mengusung simbol-simbol Islam dalam aksi dan wacana. Kekuatan framing dengan mengusung simbol-simbol agama dalam aksi, wacana, dan gerakan dalam rangka memberikan tafsir yang tendensius dan radikal untuk memenuhi agenda politik mereka. Kemunculan kekerasan aktivisme Islam juga tidak mengenal sistem pemerintahan. Pemerintahan yang otoriter atau demokratis sama-sama mencetuskan gelombang kekerasan aktivisme Islam. Oleh karena itu, watak rezim pemerintahan tidak menjadi satu determinan utama dalam memberikan insentif bagi kemunculan dan keberhasilan kekerasan aktivisme Islam.

Mohammed M. Hafez dan **Quintan Wiktorowicz** ketika menjelaskan politik kekerasan di Mesir pada dekade 1990-an menunjukkan bahwa kekerasan aktivisme Islam di Mesir dalam dekade tersebut tidak mengenal watak sistem pemerintahan. Sistem politik yang otoriter atau demokrasi sama-sama memberikan insentif bagi kemunculan aksi-aksi politik penentangan dengan cara-cara kekerasan.¹⁰

⁸ Robert A. Pape, *Dying To Win: The Strategic Logic Of Suicide Terrorism* (New York : Random House, 2005), 4.

⁹ Faisal Devji, *The Terrorist in Search of Humanity: Militant Islam and Global Politics* (New York: Columbia University Press, 2008)

¹⁰ Mohammed M. Hafez and Quintan Wiktorowicz, "Violence as Contention in the Egyptian Islamic Movement" dalam Quintan Wiktorowicz, ed. *Islamic Activism: A*

Penelitian **Marwan Khawaja** menunjukkan bahwa dalam kondisi sistem rezim yang kondusif terbukti tidak bisa menekan atau menghambat kemunculan gerakan kolektif penentangan dengan cara kekerasan, demikian juga dengan rezim yang represif. Karena itu, aksi-aksi politik penentangan dengan cara kekerasan tidak menyangkut ideologi dan watak rezim pemerintahan, tetapi lebih menyangkut tentang kemampuan mengukur **batas toleransi politik**.¹¹ Batas toleransi politik memberikan makna *dimensi struktur kesempatan politik* yang oleh Hafez dan Wiktorowicz dicirikan oleh dua fitur yang melekat di dalamnya, yaitu **akseibilitas sistem politik** dan **tingkat represi negara**. Sistem politik dikatakan aksesibel jika sistem tersebut terbuka bagi sebuah gerakan untuk menyampaikan aspirasi melalui saluran formal atau informal. Jika sistem politik cenderung eksklusif bagi upaya memberikan pengaruh kebijakan negara maka ia tidak bisa dikatakan aksesibel.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, sistem politik yang terbuka tidak menjadi satu determinan utama untuk menjelaskan kemunculan aksi kekerasan. Karena itu, para teoritikus dengan tidak mengesampingkan peranan akseibilitas sistem politik mencoba memahami tingkat represi negara. Tingkat represi negara dianggap bisa memahami kemunculan politik kekerasan secara massif dan menjelaskan bagaimana sebuah gerakan mampu bertahan lama.¹²

F. Kasus Indonesia

Perlawanan dengan kekerasan yang dilakukan oleh aktivisme Islam di Indonesia semakin bisa “diterima” karena beberapa faktor. *Pertama*, kekalahan dan marginalisasi Islam politik. Ketidakmampuan elite politik Islam dalam membawa aspirasi politik melalui saluran institusional memberikan pesan bagi keberlangsungan gerakan non-institusional, radikalisme atau aksi terorisme bagi sebagian aktivisme Islam. Kekalahan Islam politik ini terjadi baik di masa awal pembentukan negara Indonesia hingga masa rezim Sukarno dan semakin terpuruk di masa rezim diktator Orde Baru Soeharto.

Kedua, liberalisasi sistem politik. Perkembangan demokrasi liberal yang terjadi di awal pemerintahan Orde Lama tidak memberikan kemajuan berarti bagi upaya-upaya pembangunan bangsa yang berdaulat. Demokrasi liberal di masa Orde Lama justru menyebabkan stabilitas keamanan nasional semakin terancam dengan munculnya beberapa konflik dan gerakan pemberontakan bersifat kedaerahan. Hal ini

Social Movement Theory Approach (Bloomington: Indiana University Press, 2004), 61-88.

¹¹ Marwan Khawaja, “Repression and Popular Collective Action: Evidence From the West Bank,” *Sociological Forum*, Vol. 8, No. 1 (1993), 47-71.

¹² Edward N. Muller, “Income Inequality, Regime Repressiveness, and Political Violence,” *American Sociological Review*, Vol. 50, No. 1 (Feb., 1985), 47-61.

dimanfaatkan oleh sebagian aktivisme Islam di bawah pimpinan Kartosuwiryo untuk membangkitkan Islam politik dengan memobilisasi dukungan di berbagai wilayah

Ketiga, watak represi negara. Demobilisasi politik Islam oleh rezim pemerintahan Orde Baru membuka peluang gerakan Islam untuk melawan represi dengan aksi-aksi kekerasan. Akhirnya, rezim yang diktator dan represif memberikan insentif meski terbatas bagi upaya-upaya melawan represi dengan kekerasan.

Di atas semua itu, kekerasan oleh aktivisme Islam lebih ditentukan pada kemampuan mengukur batas toleransi politik; watak represi negara dan aksesibilitas sistem politik. Batas toleransi politik ini menentukan sebuah gerakan perlu tidaknya mengambil jalan kekerasan sebagai saluran penentangan.¹³

Dalam catatan **Dawam Rahardjo**, Umat Islam yang dizalimi melakukan perlawanan dengan cara kekerasan karena sudah tak ada pilihan lain. Jadi, kalau ada pihak-pihak tertentu, baik pemerintah, non-pemerintah, atau kekuatan Barat yang berupaya menghilangkan Islam politik, maka yang nanti justru akan timbul gerakan-gerakan radikal yang disebut sebagai aksi radikalisme/terorisme. Hanya dengan memberi peluang bagi politik Islam, semua radikalisme dan terorisme akan bisa dikontrol. Islam akan diperjuangkan secara terbuka di publik, DPR, dan media massa. Ini berbeda bila Islam politik diperjuangkan di bawah tanah, maka menjadi sulit dikontrol.¹⁴ Dengan logika tersebut, artinya akar dari masalah radikalisme agama bukan persoalan teologis. Persoalan radikalisme adalah persoalan kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik yang sudah tak tertahankan.

Pendekatan "Islam Moderat" yang coba ditawarkan oleh beberapa penulis seperti Azra (2006) atau Mujani (2004) pada dasarnya bukan solusi konkret yang komprehensif. Wacana ini justru dicurigai untuk memfragmentasi umat Islam agar tidak terkonsolidasi dalam satu kesatuan massa yang besar. Dengan kata lain, "Islam Moderat" adalah wacana yang diberikan oleh rezim politik untuk menghadapi ancaman-ancaman bagi rezim itu. *

¹³ Ali Asghar, "Islam Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol.1 No.2 2015

¹⁴ <https://khazanah.republika.co.id/berita/pzwv4z385/islam-politik-radikal-militan-isis-apa-sebenarnya-itu>

Referensi

- Asghar, Ali, "Islam Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam Indonesia," dalam *Jurnal Keamanan Nasional* Vol.1 No.2 2015
- Devji, Faisal Devji, *The Terrorist in Search of Humanity: Militant Islam and Global Politics* (New York: Columbia University Press, 2008)
- Hafez, Mohammed M. Hafez and Quintan Wiktorowicz, "Violence as Contention in the Egyptian Islamic Movement" dalam Quintan Wiktorowicz, ed. *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach* (Bloomington: Indiana University Press, 2004)
- Hartono, Sulisty Pudjo
<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ybDRGJPK-empat-indikator-warga-terpapar-radikalisme> diakses 15-11-2019
- Hassan, Noorhaidi, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta: SUKA PRESS UIN Sunan Kalijaga, 2012)
<https://khazanah.republika.co.id/berita/pzww4z385/islam-politik-radikal-militan-isis-apa-sebenarnya-itu>
- Jurdi, Syarifuddin, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Khawaja, Marwan Khawaja, "Repression and Popular Collective Action: Evidence From the West Bank," *Sociological Forum*, Vol. 8, No. 1 (1993)
- Muller, Edward N. Muller, "Income Inequality, Regime Repressiveness, and Political Violence," *American Sociological Review*, Vol. 50, No. 1 (Feb., 1985), 47-61.
- Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syariah: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* (Yogyakarta: Review Disertasi Doktor Sosiologi UGM, 2005)
- Pape, Robert A. Pape, *Dying To Win: The Strategic Logic Of Suicide Terrorism* (New York : Random House, 2005)

International Seminar on Sharia and the Dynamics of Political Islam in Southeast Asia

Held by Fakultas Syarifah Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang

Padang, November 30th 2019



Certificate of Appreciation



UIN IMAM BONJOL
PADANG

Proudly Presented to:


Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag

As a **Speaker** of International Seminar on


Sharia and The Dynamics of Political Islam in Southeast Asia

held by Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
November 30th 2019

Padang, November 30th 2019
Organizing Committee
Chief,


M. Yenis, S.H., M.Pd., M.H
NIP. 19601019 199803 1 001



Dean,

Dr. Errinaldi, M.Ag
NIP. 19740719 199803 1 001